



Difabel Terkendala Pengenalan Kesehatan Reproduksi

Hambat Kemandirian dan Berimbas Rentan Alami Kekerasan

JOGJA, Radar Jogja - Pengenalan kesehatan reproduksi kepada difabel atau para penyandang disabilitas mengalami kendala. Jika ini dibiarkan, akan menghambat kemandirian mereka. Selain itu, berimbas pula terhadap difabel yang rentan mengalami kekerasan.

Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Nurul Saadah Andriani membenarkan, pemenuhan hak-hak anak difabel secara umum terhambat. Diakibatkan oleh situasi yang bergantung pada lingkungan tempat tinggal difabel, baik di rumah, sekolah, atau panti. "Masih ditemukan orang tua yang bingung, bagaimana bertindak yang tepat bagi difabel," ujarnya kepada Radar Jogja sebelum penyampaian hasil riset keinginan dan kebutuhan anak disabilitas di Kompleks Balai Kota Jogja kemarin (31/10). Kebingungan ortu, sekolah, dan

panti dalam menyikapi difabel ini semakin kompleks kala difabel beranjak masuk masa pubertas. Lantaran difabel cenderung lebih sering tantrum. Sementara lingkungannya memiliki keterbatasan dalam memahami kehadiran difabel. "Maka kami merekomendasikan, ada pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak disabilitas usia remaja dengan melibatkan ortu/pengasuh/pengdamping," tegasnya.

Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Luar Biasa (MKKSLB) Kota Jogja Sri Andarini Eka Prapti membeberkan masalah yang ditemuinya dan aduan yang dia dapat. Ada ortu yang mengeluh kesulitan memberikan layanan ke anaknya yang difabel. "Ortu bingung, agar anak tidak tantrum," ucapnya.

Menurutnya, anak difabel ini kerap kali membenturkan kepalanya. Itu dilakukan pada benda padat. Sementara anak difabel ini tidak diketahui apa akibat yang akan dialaminya. "Ada anak lain di sekolah saya, yang saat tantrum sampai melepas seluruh

pakaiannya," ujarnya.

Jilah, salah seorang ibu dengan anak difabel juga mengungkap pengalamannya. Putranya yang difabel, kini berusia 17 tahun dengan fisik yang bongor. "Saya hanya membiarkan anak, ketika tantrumnya kumat, anak saya sedang masuk pubertas," sebutnya.

Jilah sempat meminta bantuan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) Kota Jogja. Warga Sorosutan, Umbulharjo, Kota Jogja ini telah meminta bantuan sejak anaknya duduk di bangku SD. "Berulang kali, katanya tidak ada data. Sampai sekarang. Tapi dari Dinsos Nakertrans, anak saya tidak memenuhi syarat," ucapnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Eni Dwinarsih mengatakan, edukasi reproduksi memang merupakan hal sensitif. Dia bahkan mengaku kesulitan memberi edukasi reproduksi bagi non-difabel. "Ini jadi program terpenting, kesehatan reproduksi juga dibutuhkan peran ortu," ucapnya. **(fat/din/fj)**



SITI FATMAH/RADAR JOGJA

KEBUTUHAN: Penyampaian hasil riset keinginan dan kebutuhan anak disabilitas oleh SAPDA di Kompleks Balai Kota Jogja kemarin (31/10).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005